

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2022

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi NTB disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan laporan LKjIP ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhirnya dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Mataram, Februari 2023
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
SEKRETARIS



Drs. H. SURYA BAHARI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	2
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	2
1.4 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	3
1.5 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	4
1.6 SUMBER DAYA.....	14
1.7 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	16
1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	18
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 PERENCANAAN	20
2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023.....	20
2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023.....	21
2.1.3 TUJUAN	21
2.1.4 SASARAN	22
2.1.5.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI.....	24
2.1.5.2. STRATEGI	24
2.1.5.3. ARAH KEBIJAKAN.....	25
2.1.5 PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2022	25
2.1.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2022).....	29
2.1.7 PERJANJIAN KINERJA (TAHUN 2022)	30
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	33

3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR	33
3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023.....	33
3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDART NASIONAL (TIDAK ADA)	39
3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	40
3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	46
3.8 CROSS CUTTING.	51
3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	52
3.10 REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV	59
PENUTUP	59
4.1 KESIMPULAN.....	59
4.2 LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR GAMBAR

Daftar	HAL.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB	5
Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan golongan	15
Gambar 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan, dan Jenis Kelamin.....	15
Gambar 3.1 Kepuasan Responden terhadap 14 Unsur Pelayanan Sekretariat DPRD	34
Gambar 3.2 Nilai rata-rata kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD.....	35
Gambar 3.3 Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB tahun 2022.....	58

DAFTAR TABEL

TABEL	HAL.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD NTB	15
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTB	15
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	15
Tabel 1.4 Stuktur Anggaran Sekretariat DPRD TA. 2022	16
Tabel 1.5 Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2022.....	16
Tabel 2.1 Target Renstra Sekretariat DPRD NTB Tahun 2019-2023	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	23
Tabel 2.3 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD NTB	24
Tabel 2.4 Tabel Program Kegiatan, SubKegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022	25
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022	29
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022	30
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022	30
Tabel 2.8 Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022	30
Tabel 3.1 Interpretasi Hasil Survei	32
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022.....	33
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	33
Tabel 3.4 Capaian Target Kinerja Rentsra Tahun 2022	34
Tabel 3.5 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2022	40
Tabel 3.6 Tingkat Efiseinsi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	42
Tabel 3.7 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	47
Tabel 3.8 Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja	

	Tahun 2022	51
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	52
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan penjelasan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja dimulai dari rencana strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan dan sasaran yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun indikator yang digunakan pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2022.

Dana yang dialokasi melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2022 mengalami beberapa kali refocusing akibat dampak dari pandemi covid-19 sehingga APBD Provinsi NTB harus menyesuaikan anggaran sampai 3 (tiga) kali perubahan Perkada dan 2 (dua) kali pergeseran setelah ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2022. Adapun APBD murni melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp. 112.831.976.172,-.

Adapun APBD murni hasil refocusing (Perkada II) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yaitu Nomor : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 112.831.976.172,- , APBD murni hasil refocusing (Perkada III) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yaitu Nomor : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 111.876.378.865,- dan APBD murni hasil refocusing (Perkada IV) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yaitu Nomor :

DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 111.876.378.865,- serta alokasi dana APBD Perubahan melalui Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 128.177.831.741,- dan APBD perubahan hasil refokusing I melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yaitu Nomor : DPPA/B.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 07 November 2022 sebesar Rp. 128.177.831.741,- , serta APBD perubahan hasil refocusing II melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB yaitu Nomor : DPPA/B.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 09 Desember 2022 sebesar Rp. 128.177.831.741,-

Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.120.649.100.319,- (94,13%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.528.731.422,- (5,87%). Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.65.304.657.308,- (93,22%).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp.55.344.443.011,- (95,22%).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*). Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan yaitu konsep (*Good Governance*) tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani dan pihak swasta. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, harus dapat menyusun rencana program, kegiatan, subkegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan visi dan misi Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sekretariat DPRD Provinsi NTB) Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
2. Mendorong (Sekretariat DPRD Provinsi NTB) didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Provinsi NTB didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sehingga perlu diganti bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekretariat DPRD (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SETWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi SETWAN, terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha,
- d. Bagian Keuangan,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Peningkatan pelayanan kepada DPRD tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Permasalahan Utama dan Isu – isu strategis Sekretariat DPRD provinsi NTB diidentifikasi melalui serangkaian proses kemudian dirumuskan isu strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.

3. Struktur Organisasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
4. Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu:

“Belum optimalnya pelayanan fasilitasi koordinasi antara pihak legislatif dengan eksekutif.”

1.5 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai fungsi :

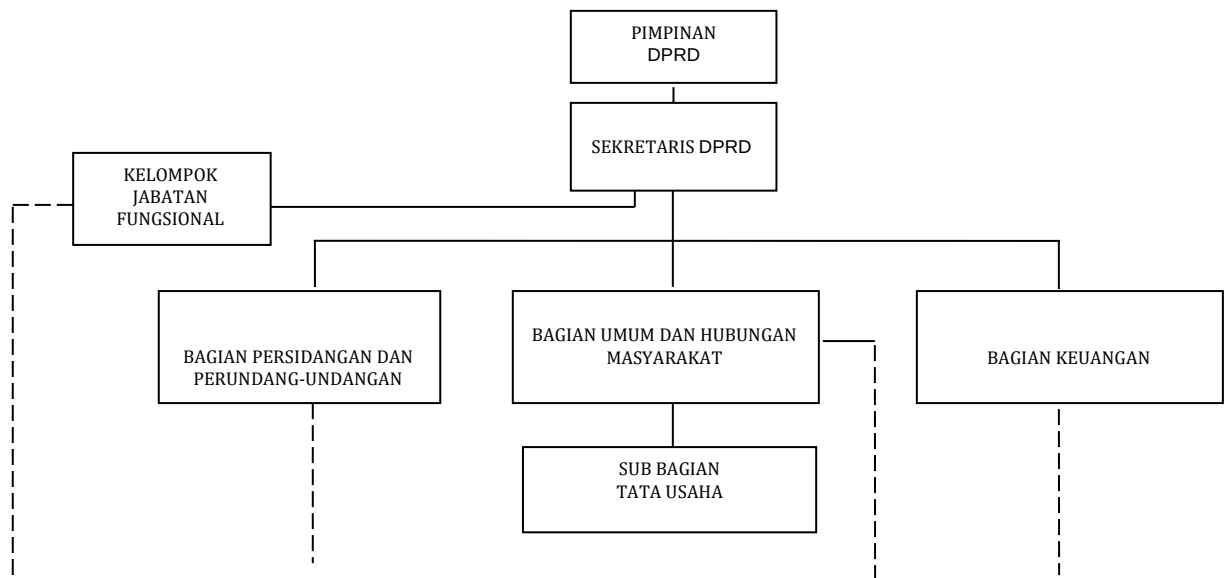
- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan
- d. Bagian Keuangan, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023

C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

I. SEKRETARIS

➤ Rincian Tugas

- Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;

- h. Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelenggaraan persidangan;

- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;

- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

➤ Rincian Tugas

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan suratmenyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan, pendistribusian naskah dinas;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;

- j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

- i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
- n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;
- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan

tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsional Perisalah Legislatif

Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. Fungsional Perencana

Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana

pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. Fungsional Hubungan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan website dan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dan kunjungan ke media (*media visit*).

7. Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

1.6 SUMBER DAYA

Pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 74 (tujuh puluh empat) subkegiatan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp. 128,177,831,741,- yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD, sampai dengan Bulan Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 120,649,100,319,- (94,13%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2022 adalah rata-rata sebesar 82,39%, dan realisasi fisik rata-rata 94.13%.

1.6.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya utama dalam menjalankan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan (goal) yang diharapkan. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat menjadi tolok ukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi NTB didukung oleh 126 (seratus dua puluh enam) personil PNS. Berikut data dan kondisi Sumber Daya Manusia (pegawai) berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin yang tersedia pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Data PNS / Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB
Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	1	2	3
1	Eselon II	1	1.	Golongan IV	5
2	Eselon III	3	2.	Golongan III	66
3	Eselon IV	1	3.	Golongan II	52
4	Fungsional Khusus	11	4.	Golongan I	3
5	Fungsional Umum	110	Total		126

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
Total		126

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2022

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai yang mendominasi adalah pegawai berpendidikan SMA ke bawah (golongan I dan II) sebanyak 56 orang atau 43,65%, dan tingkat pendidikan Diploma ke atas mencapai $\pm$ 48,41% hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi NTB perlu ditingkatkan.

Tabel 1.2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	7
2	S1/D4	58
3	D3	5
4	D2	1
5	SMA/SEDERAJAT	50
6	SMP	4
7	SD	1
Total		126

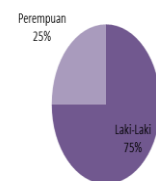
Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi NTB selain PNS juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 4 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 153 orang. SDM Non PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pegawai Tidak Tetap	3	1	4
2.	Tenaga Kontrak	115	38	153
TOTAL		118	39	157

Jumlah Pegawai Non PNS



Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

1.6.2 SARANA PRASARANA

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menunjang tugas-tugas pelayanan pada pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi NTB didukung oleh sarana dan prasarana yang pengadaannya setiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan para anggota DPRD. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan

Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dikategorikan memenuhi syarat standart minimal yang memungkinkan pelayanan terhadap anggota DPRD dapat lebih optimal. Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah Sarana dan Prasarana pada kondisi akhir tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

NO	NAMA ASET	JUMLAH*
1	2	3
1	Alat-alat Besar	18 Buah
2	Alat-alat Angkutan	90 Buah
3	Alat Pertanian	18 Buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.247 Buah
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	460 Buah
6	Alat-alat Kedokteran	1 Buah
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	229 Buah
8	Bangunan Gedung	23 Buah
9	Monumen	2 Buah
10	Jalan dan Jembatan	1 Buah
11	Instalasi	4 Buah
12	Jaringan	32 Buah
13	Barang Bercorak Kebudayaan	9 Buah

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2022* Data Sementara

1.6.3 Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022 disajikan pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.5 Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2022

URAIAN	ANGGARAN
1	2
SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	128.177.831.741
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	70.054.687.190
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	58.123.144.551

Sumber : DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2022

1.7 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan, Pemerintah Provinsi NTB telah berupaya dan bertekad menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat melalui organisasi publik atau Perangkat Daerah secara periodik. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seluruh instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, berkewajiban menyusun LKjIP yang dapat dijadikan sebagai salah satu *tools* bagi *stakeholder* (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat) untuk melakukan supervisi yang diperlukan serta dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi Pemerintah dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pejabat suatu instansi Pemerintah.

Penerapan LKjIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan di atas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dipandang akan dapat berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka LKjIP yang disusun Sekretariat DPRD Provinsi NTB memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKjIP tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dalam penyampaian LKjIP oleh setiap instansi Pemerintah.

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum tentang Sekretariat DPRD Provinsi NTB, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Provinsi NTB, Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Sumber Daya Perangkat Daerah, Tujuan Penyusunan Laporan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Visi Misi Pemerintah Provinsi NTB, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah, Capaian Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning dan Growth* serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 3 (tiga) tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya. Rencana Kinerja adalah rencana yang ingin di capai atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1.1 Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023

Untuk mendukung pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah :

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

2.1.2 Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui Akselerasi penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah
- Misi 2 : **NTB BERSIH DAN MELAYANI** melalui **Akselerasi transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi**
- Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS melalui Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
- Misi 4 : NTB ASRI DAN LESTARI melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
- Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui Akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
- Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui Akselerasi perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan

Berdasarkan visi dan misi Gubernur NTB Tahun 2019-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan visi dan misi gubernur, terutama pada **misi ke 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI”** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan tujuan untuk tahun 2019-2023 yaitu:

“Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas”.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dan terukur dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Renstra. Fokus utama sasaran tersebut adalah tindakan dan alokasi sumber daya suatu organisasi di dalam kegiatan organisasi yang dapat dinilai, diukur, dicapai pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama 5 (lima) tahun ke depan periode 2019 – 2023 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas”. Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”.**

Hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB beserta indikator sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Renstra Sekretariat DPRD 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA					FORMULASI PENGUKURAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas			Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kategori yang diberikan sebagai Hasil Survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Sumber Data : Kuisisioner
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase Hasil Survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Sumber Data : Kuisisioner

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA					FORMULASI PENGUKURAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai			BB	BB	BB	Hasil Penilaian SAKIP 2021 oleh TIM SAKIP NTB
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase			100%	100%	100%	Data Sekretariat DPRD NTB

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB dan mengerjakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi NTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan tugas tersebut Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang menjelaskan mengenai kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap Lembaga/Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB merumuskan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Formulasi Pengukuran: Prosentase Hasil survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Sumber Data: Kuisisioner

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

2.1.5.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TUJUAN: Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1		Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas dan Disetujui	Perda	16	16	12	12	14	11	16	8	12	12	
2		Kegiatan Hearing/Dialog Pimpinan Dan Anggota DPRD Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Yang Difasilitasi	Kali/Orang	480	120	48	480	540	60	1.077	925	480	480	
3		Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Difasilitasi	Kali	252	480	480	480	268	540	192	207	480	480	
4		Rapat Paripurna Yang Difasilitasi	Kali	48	252	48	48	46	268	40	42	46	46	
5		Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
6		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	28	2860	2860	2860	28	2898	4918	3182	2860	2860	
7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Bintek/Workshop) Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	3	65	65	65	3	65	65	65	65	65	
8		Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	32	32	36	36	39	53	53	68	36	36	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022

2.1.5.2. STRATEGI

Strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB. Strategi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Peningkatan Standarisasi Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Penyediaan Tenaga Ahli dan memfasilitasi koordinasi antara pihak legislative dengan eksekutif.

2.1.5.3. ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selanjutnya diperjelas dengan serangkain kebijakan. Arah kebijakan yang digunakan yaitu:

1. Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur.
2. Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
4. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi.
5. Optimalisasi Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli
7. Optimalisasi Fasilitas Koordinasi antara Legislatif dengan Eksekutif

Arah Kebijakan yang digunakan sebagai arah dalam menentukan program, kegiatan, subkegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

2.1.5 PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2022

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB, menindaklanjutinya dalam kebijakan operasional yang akan memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode tahun 2019-2023 dalam bentuk Program, Kegiatan, Subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN		INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
1	2	3	4		5	6
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BB		Nilai SAKIP OPD	70,054,687,190
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Dok	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	565,098,200
	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dok	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	203,071,000
	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	Jumlah dokumen RKA yang disusun	77,806,000
	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	105,361,200
	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dok	Jumlah dokumen DPA yang disusun	12,968,900
	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	dok	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	23,440,000
	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	dok	Jumlah dokumen LKJIP	35,135,100
	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	dok	Jumlah dokumen evaluasi PD	107,316,000
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Jenis	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	13,032,504,344
	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129	Org	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12,364,337,344
	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Org	Jumlah PTT	235,002,900

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
1	2	3	4	5	6
	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dok	Jumlah dokumen yang di verifikasi	214,449,700
	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	30,207,400
	4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3 dok	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	188,507,000
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 dok	Jumlah dokumen administrasi BMD	19,825,000
	4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dok	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	1,625,000
	4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- jenis	Jumlah jenis DMD yang diamankan	-
	4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dok	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	6,125,000
	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 jenis	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	12,075,000
	4.02.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- jenis	jumlah jenis barang	-
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 jenis	Jumlah jenis layanan kepegawaian	1,206,368,000
	4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	129 Org	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	266,952,000
	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	129 Org	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	742,150,000
	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	129 Org	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawannya	69,266,000
	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-
	4.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Org	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	25,000,000
	4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	103,000,000
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 jenis	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	4,549,289,940
	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	131,208,000
	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-
	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	937,023,650
	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22 jenis	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	150,715,740
	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	56,700,000
	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	179,380,000
	4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	- jenis	jumlah jenis bahan/material	-
	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2200 Org	Jumlah tamu yang difasilitasi	2,030,250,000
	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Kali	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	937,202,000
	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 jenis	jumlah jenis bahan arsip	52,120,550
	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16 Org	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	74,690,000
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	61,000,000
	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	-
	4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	-
	4.02.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 Unit	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	-
	4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3 jenis	Jumlah Mebel yang tersedia	24,000,000
	4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 jenis	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	37,000,000
	4.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- jenis	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	-
	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Unit	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN		INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
1	2	3	4		5	6
	4.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Unit	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	-
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	jenis	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5,596,738,760
	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	surat	Jumlah surat keluar	27,175,000
	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	jenis	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	902,197,200
	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116	Org	jumlah orang jasa pelayanan umum	4,667,366,560
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	1,898,151,000
	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	unit	Jumlah kendaraan jabatan	167,600,000
	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66	unit	Jumlah kendaraan operasional	696,706,000
	4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	6	jenis	jumlah jenis mebel	12,500,000
	4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	jenis	jumlah jenis peralatan dan mesin	234,150,000
	4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	jenis	jumlah aset tetap lain	787,195,000
	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	Jumlah gedung yang dipelihara /rehabilitasi	-
	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara /rehabilitasi	-
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3	Jenis	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	42,315,913,096
	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	65	Org	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	41,925,913,096
	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	item	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	
	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	65	Org	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	390,000,000
	4.02.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	3	jenis	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	809,798,850
	4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	
	4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	180	kali	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	198,740,700
	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	46	kali	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	154,364,800
	4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3	jenis	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	456,693,350
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100	%	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	58,123,144,551
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	9	dok	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	12,619,972,300
	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6	raperda	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	761,222,800
	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	12	raperda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	313,911,500
	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1	kali	Jumlah sosialisasi perda	11,222,968,000
	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	6	naskah	Jumlah naskah akademik	301,320,000
	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	dok	Jumlah dokumen tata tertib	20,550,000
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4	dok	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	1,088,010,000
	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	14	kali	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	409,717,500
	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15	rapat	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	155,684,500
	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	14	rapat	Jumlah rapat Pembahasan APBD	213,587,000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN		INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
1	2	3	4		5	6
	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	10	rapat	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	193,960,500
	4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	-	kali	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Semester	-
	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	rapat	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	115,060,500
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5	dok	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	414,604,900
	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	kali	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	80,022,500
	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	kali	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	93,930,700
	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	kali	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	81,187,500
	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	kali	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	87,051,700
	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	kali	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	72,412,500
	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	Dok	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-
	4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	kali	Jumlah rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	-
	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Jumlah rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	65	Org	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	6,020,183,800
	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	-	org	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi	-
	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	65	org	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	2,811,615,900
	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	36	kali	Jumlah publikasi dan dokumentasi	2,102,319,800
	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	200	org	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	493,680,000
	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9	org	Jumlah tenaga ahli fraksi	436,101,600
	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	480	org	Jumlah orang yang difasilitasi	132,448,000
	4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1	dok	Jumlah dokumen program kerja DPRD	44,018,500
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5	dok	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28,798,305,551
	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	975	SPPD	Jumlah SPPD	7,256,912,651
	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2	dok	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	97,048,000
	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	3	kali	Jumlah reses	21,444,344,900
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2	dok	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	38,477,200
	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1	Dok	Jumlah dokumen kode etik DPRD	28,848,900
	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	12	kali	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	9,628,300
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	4	Jenis	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	9,143,590,800
	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	975	SPPD	Jumlah SPPD	8,405,165,000
	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1	dok	Jumlah laporan kinerja DPRD	11,530,500
	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	dok	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	98,787,100
	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	org	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	628,108,200
		TOTAL USULAN ANGGARAN				128,177,831,741

2.1.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2022)

Perencanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2019-2023. Dimana Program Kegiatan yang telah ditentukan merupakan program-kegiatan prioritas perangkat daerah sesuai dengan Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022, Program Kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD,

Sedangkan Rincian Kegiatan/Major Project Sekretariat DPRD Provinsi NTB, sebagaimana berikut:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2023	PROGRAM
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas		Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang Diinisiasi DPRD	100%	66.67 %	100%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	100%*	100%	
		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	12 Perda	8 Perda	12 Perda	
		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	480 orang	925 orang	480 Orang	
		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	480 kali	207 kali	480 Kali	
		Rapat paripurna yang difasilitasi	jumlah rapat paripurna	46 kali	42 kali	46 Kali	
		Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	3 kali	3 Kali	
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2860 SPPD	3182 SPPD	2860 SPPD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/ pelatihan lainnya	65 orang	65 orang	65 Orang	
		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	36 kali	68 kali	36 Kali	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022, * Data Sementara

2.1.7 PERJANJIAN KINERJA (TAHUN 2022)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta besaran anggaran program/kegiatan strategis SKPD pada tahun anggaran bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai salah satu *tools* bagi *stakeholder* (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat) untuk melakukan supervisi yang diperlukan serta dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi Pemerintah dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pejabat suatu instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

Untuk mencapai target Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 hanya didukung oleh 2 (dua) program yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan total anggaran pada APBD murni tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 112.831.976.172,-. Anggaran pada perjanjian kinerja tersebut dirubah pada DPA Perubahan sehingga menjadi Rp.128.177.831.741. Rincian anggaran untuk melaksanakan perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah.

Tabel 2.8 Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN PK	ANGGARAN DPA PERUBAHAN
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	69.272.273.072	70.054.687.190
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	43.559.703.100	58.123.144.551
Total	112.831.976.172	128.177.831.741

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk mengukur capaian kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menggunakan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan pada akhir tahun 2022, dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang berjumlah 65 orang.

Kuisioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap 14 unsur pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD yaitu :

1. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)
2. Kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD.
3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses.
4. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD.
5. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD.
6. Kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD

7. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD
8. Kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.
9. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana.
10. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD.
11. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.
12. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait penyelesaian temuan Inspektorat, Irjen dan BPK.
13. Ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD.
14. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan.

Setiap pernyataan diberikan pilihan jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan pelayanan dimulai dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- 1) Sangat tidak puas , diberi nilai 1;
- 2) Tidak puas, diberi nilai 2;
- 3) Puas, diberi nilai 3;
- 4) Sangat puas, diberi nilai 4.

Interpretasi hasil survei kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD diperoleh berdasarkan rentang kriteria dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interpretasi Hasil Survei

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KINERJA PELAYANAN
1	2	3
1,00-2,5996	25,00-64,99	Tidak baik
2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang baik
3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik
3,5324-4,00	88,31-100,00	Sangat Baik

3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022 yaitu digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD NTB tahun 2022, sehingga dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD NTB secara realistis yang dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Hasil survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB merupakan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

Secara keseluruhan capaian kinerja pada Sekretariat DPRD NTB tahun 2022 berdasarkan hasil survey: 100% (kategori baik). Adapun hasil survei tersebut berdasarkan perhitungan skor kepuasan. penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan skor kepuasan 3,09 Skala Likert, apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 77,34 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD NTB

termasuk dalam kategori baik, sehingga capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 100 persen.

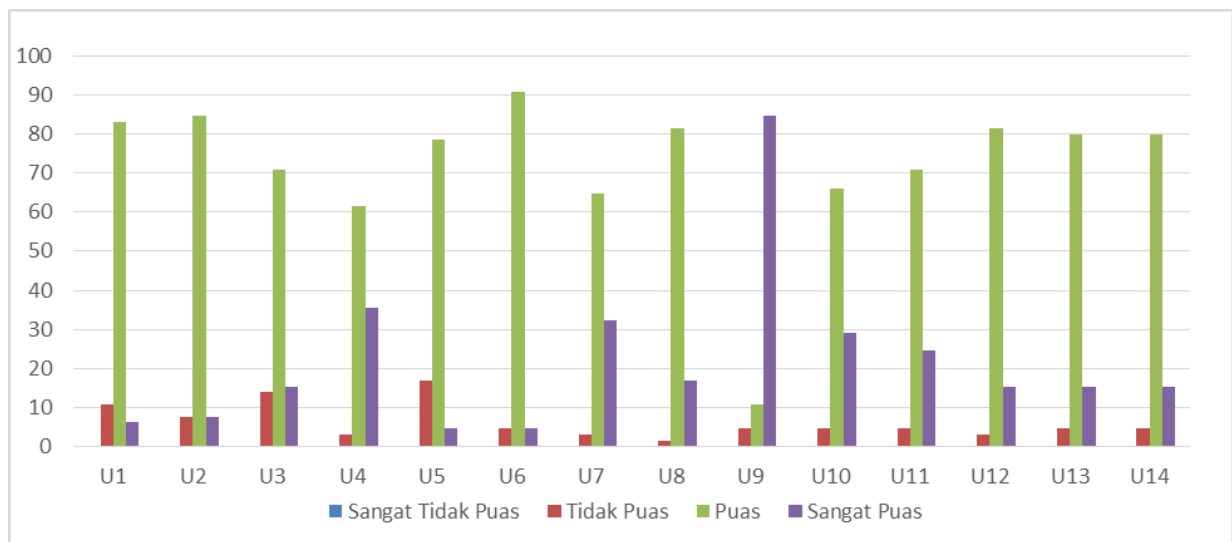
Hasil survei penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB tahun 2022 termasuk dalam kategori baik, apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis pada tahun 2022 yaitu kategori baik, maka capaian target rencana strategis untuk tahun 2022 yaitu 100 persen.

Tabel 3.4 Capaian Target Kinerja Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET PK		REALISASI PK		CAPAIAN TAHUN 2022 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2023)	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2023*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022*perkiraan sementara.

Rincian hasil survei terhadap 14 unsur pelayanan, dapat digambarkan sebagai berikut:

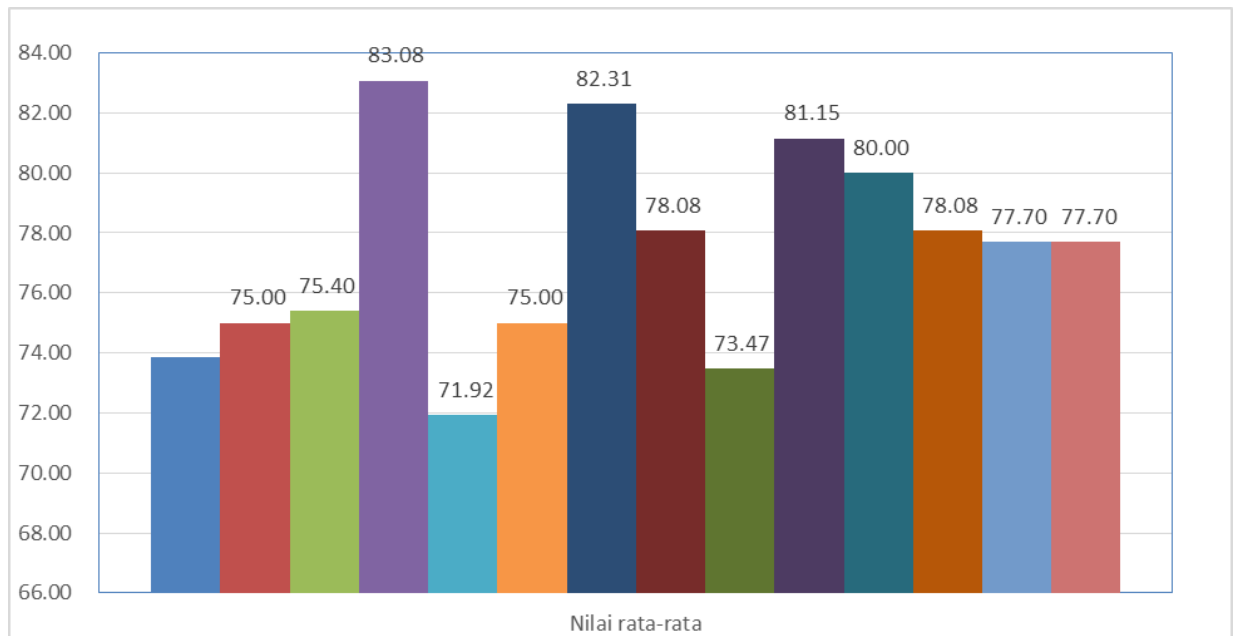


Gambar 3.1 Kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD

1. **Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)**

Penilaian mengenai kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir) dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden yang menyatakan puas sebanyak

54 responden atau 83.08 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 4 responden atau 6,2 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 7 responden atau 10,8 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U1 menunjukkan skor kepuasan 2,95 Skala Likert.



Gambar 3.2 Nilai rata-rata kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD

2. Kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD.

Hasil survei terhadap unsur kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden yang menyatakan puas sebanyak 55 responden atau 84,6 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 5 responden atau 7,7 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 5 orang atau 7,7 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U2 menunjukkan skor kepuasan 3,00 Skala Likert.

3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses.

Penilaian terhadap kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan

dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 46 responden atau 70.77 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15.39 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 9 orang atau 13.85 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U3 menunjukkan skor kepuasan 3,02 Skala Likert.

4. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD

Penilaian terhadap kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 40 responden atau 61,5 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 23 responden atau 35,4 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 2 responden atau 3,1 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U4 menunjukkan skor kepuasan 3,32 Skala Likert.

5. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD.

Penilaian terhadap kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 51 responden atau 78,5 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 3 responden atau 4,6 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 11 responden atau 16,9 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U5 menunjukkan skor kepuasan 2,88 Skala Likert.

6. Kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD NTB

Penilaian terhadap kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 59 responden atau 90.8 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 3 responden atau 4.6 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak

puas sebanyak 3 responden atau 4.6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U6 menunjukkan skor kepuasan 3,00 Skala Likert.

7. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD.

Penilaian terhadap unsur kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 42 responden atau 64,6 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 21 responden atau 32,3 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 2 responden atau 3 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U7 menunjukkan skor kepuasan 3,29 Skala Likert.

8. Kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.

Penilaian terhadap unsur kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 53 responden atau 81.5 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 11 responden atau 16,9 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 1 responden atau 1.5 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U8 menunjukkan skor kepuasan 3,12 Skala Likert.

9. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana.

Penilaian terhadap unsur kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 55 responden atau 84,6 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 7 responden atau 10.8 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 4.6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U9 menunjukkan skor kepuasan 2,94 Skala Likert.

10. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 43 responden atau 66,2 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 19 responden atau 29,2 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 4,6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U10 menunjukkan skor kepuasan 3,25 Skala Likert.

11. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 46 responden atau 70,8 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 16 responden atau 24,6 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 4,6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U11 menunjukkan skor kepuasan 3,20 Skala Likert.

12. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait penyelesain temuan Inspektorat, Irjen dan BPK.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait penyelesain temuan Inspektorat, Irjen dan BPK dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 53 responden atau 81,5 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,4 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 2 responden atau 3,1 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U12 menunjukkan skor kepuasan 3,12 Skala Likert.

13. Ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 52 responden atau 80 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,4 persen. Sementara yang responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 4.6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U13 menunjukkan skor kepuasan 3,11 Skala Likert.

14. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan.

Penilaian terhadap unsur kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 52 responden atau 80 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,4 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 4.6 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U14 menunjukkan skor kepuasan 3,11 Skala Likert.

3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDART NASIONAL (TIDAK ADA)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, pada satu sisi prinsip desentralisasi menciptakan otonomi daerah (termasuk dalam konteks pembangunan), pada sisi yang lain perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Keselarasan rencana pembangunan dapat dipahami sebagai tingkat sejauh mana rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan lebih rendah merupakan bagian integral (satu kesatuan) dari dan disusun mengacu rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat kontribusi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota kepada pemerintahan pusat dapat diidentifikasi dalam rangka memastikan tujuan pembangunan

nasional. Namun demikian Standar nasional realisasi kinerja untuk Sekretariat DPRD Provinsi NTB belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD” dengan indikator kinerja berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah ” Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”. Target dan capaian indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2022

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022

Melihat capaian kinerja indikator, dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah berhasil melaksanakan seluruh program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran Tahun 2022. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Prov. Nusa Tenggara Barat adalah :

- Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
- Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

- iv. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
- v. Struktur Organisasi Kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
- vi. Komitmen dan Kerjasama yang baik antara staff.
- vii. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- viii. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik kedepan.
- ix. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
- x. Dukungan Kebijakan dan Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
- xi. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- xii. Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Sedangkan faktor penyebab tidak terealisasinya pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 20,03% dari target 100% dan pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang hanya tercapai 21,81% adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD NTB, permasalahan lainnya adalah:

- i. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terjadwal menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
- ii. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPR
- iii. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan
- iv. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah
- v. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat DPRD
- vi. Tingginya frekwensi kerja insidentil

- vii. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.
- viii. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.
- ix. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Solusi dan langkah langkah kinerja yang akan dan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengatasi kegagalan atau penurunan kinerja, sebagai berikut:

- i. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.
- ii. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
- iii. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.
- iv. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-undangan.
- v. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan SDM Aparatur.
- vi. Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

Tabel 3.6 Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2022

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2022			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB		128,177,831,741	120,649,100,319	94.13	94.13	7,528,731,422
BELANJA SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB		128,177,831,741	120,649,100,319	94.13	94.13	7,528,731,422
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	70,054,687,190	65,304,657,308	93.22	93.22	4,750,029,882
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	565,098,200	492,881,904	87.22	87.22	72,216,296
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	203,071,000	182,286,104	89.76	89.76	20,784,896
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	77,806,000	61,446,100	78.97	78.97	16,359,900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	105,361,200	100,102,500	95.01	95.01	5,258,700

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2022			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	12,968,900	5,744,000	44.29	44.29	7,224,900
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	23,440,000	17,814,500	76.00	76.00	5,625,500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	35,135,100	29,902,700	85.11	85.11	5,232,400
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD	107,316,000	95,586,000	89.07	89.07	11,730,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	13,032,504,344	12,264,257,242	94.11	94.11	768,247,102
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12,364,337,344	11,643,104,382	94.17	94.17	721,232,962
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa	235,002,900	227,764,880	96.92	96.92	7,238,020
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang di verifikasi	214,449,700	209,907,100	97.88	97.88	4,542,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	30,207,400	29,534,300	97.77	97.77	673,100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	188,507,000	153,946,580	81.67	81.67	34,560,420
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	19,825,000	3,970,000	20.03	20.03	15,855,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	1,625,000	1,625,000	100.00	100.00	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	6,125,000	2,345,000	38.29	38.29	3,780,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis bahan penatausahaan BMD	12,075,000	-	0.00	0.00	12,075,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian	1,206,368,000	927,927,980	76.92	76.92	278,440,020
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	266,952,000	253,786,000	95.07	95.07	13,166,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		742,150,000	510,522,000	68.79	68.79	231,628,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	69,266,000	65,619,980	94.74	94.74	3,646,020
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	25,000,000	-	0.00	0.00	25,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	103,000,000	98,000,000	95.15	95.15	5,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum OPD	4,549,289,940	4,255,533,549	93.54	93.54	293,756,391
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	131,208,000	123,835,000	94.38	94.38	7,373,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	937,023,650	890,109,000	94.99	94.99	46,914,650
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	150,715,740	138,219,625	91.71	91.71	12,496,115
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	56,700,000	49,530,000	87.35	87.35	7,170,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	179,380,000	168,664,400	94.03	94.03	10,715,600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	2,030,250,000	1,968,527,024	96.96	96.96	61,722,976
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	937,202,000	882,994,000	94.22	94.22	54,208,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip	52,120,550	22,354,500	42.89	42.89	29,766,050
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	74,690,000	11,300,000	15.13	15.13	63,390,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	61,000,000	60,660,000	99.44	99.44	340,000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	-	-	0.00	0.00	-
Pengadaan Mebel		24,000,000	23,750,000	98.96	98.96	250,000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2022			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	37,000,000	36,910,000	99.76	99.76	90,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	-	-	0.00	0.00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5,596,738,760	5,318,867,133	95.04	95.04	277,871,627
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar	27,175,000	18,362,500	67.57	67.57	8,812,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	902,197,200	821,929,553	91.10	91.10	80,267,647
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga non ASN	4,667,366,560	4,478,575,080	95.96	95.96	188,791,480
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah	1,898,151,000	1,682,151,341	88.62	88.62	215,999,659
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	167,600,000	165,431,595	98.71	98.71	2,168,405
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional	696,706,000	634,717,396	91.10	91.10	61,988,604
Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel	12,500,000	12,075,000	96.60	96.60	425,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin	234,150,000	178,729,800	76.33	76.33	55,420,200
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain	787,195,000	691,197,550	87.81	87.81	95,997,450
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang dipelihara / rehabilitasi	-	-	0.00	0.00	-
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	42,315,913,096	39,541,138,659	93.44	93.44	2,774,774,437
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	41,925,913,096	39,269,370,675	93.66	93.66	2,656,542,421
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD	390,000,000	271,767,984	69.68	69.68	118,232,016
Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	809,798,850	757,269,500	93.51	93.51	52,529,350
Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah fasilitasi fraksi DPRD	198,740,700	173,132,100	87.11	87.11	25,608,600
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	154,364,800	128,690,000	83.37	83.37	25,674,800
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD	456,693,350	455,447,400	99.73	99.73	1,245,950
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	58,123,144,551	55,344,443,011	95.22	95.22	2,778,701,540
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	12,619,972,300	11,991,045,821	95.02	95.02	628,926,479
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	761,222,800	622,307,800	81.75	81.75	138,915,000
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	313,911,500	136,691,500	43.54	43.54	177,220,000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perda	11,222,968,000	10,936,726,521	97.45	97.45	286,241,479
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	301,320,000	295,320,000	98.01	98.01	6,000,000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib	20,550,000	-	0.00	0.00	20,550,000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	1,088,010,000	735,659,300	67.62	67.62	352,350,700
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	409,717,500	234,849,000	57.32	57.32	174,868,500
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	155,684,500	68,354,000	43.91	43.91	87,330,500
Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	213,587,000	179,436,300	84.01	84.01	34,150,700
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan			77.68	77.68	

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI s/d DESEMBER 2022			SISA ANGGARAN (Rp.)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	APBD	193,960,500	150,660,000			43,300,500
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	115,060,500	102,360,000	88.96	88.96	12,700,500
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	414,604,900	400,514,600	96.60	96.60	14,090,300
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	80,022,500	79,016,700	98.74	98.74	1,005,800
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	93,930,700	92,979,700	98.99	98.99	951,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	81,187,500	80,668,500	99.36	99.36	519,000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	87,051,700	76,276,900	87.62	87.62	10,774,800
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	72,412,500	71,572,800	98.84	98.84	839,700
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	0.00	0.00	-
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	6,020,183,800	5,071,110,227	84.24	84.24	949,073,573
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	2,811,615,900	2,778,814,527	98.83	98.83	32,801,373
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi	2,102,319,800	1,536,329,700	73.08	73.08	565,990,100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	493,680,000	198,900,000	40.29	40.29	294,780,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	436,101,600	432,000,000	99.06	99.06	4,101,600
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi	132,448,000	98,447,500	74.33	74.33	34,000,500
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	44,018,500	26,618,500	60.47	60.47	17,400,000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28,798,305,551	28,485,174,179	98.91	98.91	313,131,372
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD	7,256,912,651	7,128,779,669	98.23	98.23	128,132,982
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	97,048,000	77,503,000	79.86	79.86	19,545,000
Pelaksanaan Reses	Jumlah reses	21,444,344,900	21,278,891,510	99.23	99.23	165,453,390
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	38,477,200	8,392,500	21.81	21.81	30,084,700
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD	28,848,900	6,304,200	21.85	21.85	22,544,700
Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	9,628,300	2,088,300	21.69	21.69	7,540,000
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	9,143,590,800	8,652,546,384	94.63	94.63	491,044,416
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD	8,405,165,000	8,044,842,884	95.71	95.71	360,322,116
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD	11,530,500	-	0.00	0.00	11,530,500
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	98,787,100	69,105,300	69.95	69.95	29,681,800
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	628,108,200	538,598,200	85.75	85.75	89,510,000

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam menjalankan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan (goal) yang diharapkan. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat menjadi tolok ukur tingkat pencapaian tujuan organisasi/instansi. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebanyak 129 ASN. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB tersebut belum ideal jika memperhatikan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku perangkat daerah yang memfasilitasi koordinasi antara pihak legislative dengan eksekutif. Terlebih pada tahun 2022 perencanaan dan penganggaran masih diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, yang berakibat pada kurangnya realisasi belanja keuangan Sekretariat DPRD NTB yaitu sebesar 94,13% sebagai bagian dari Skema Pengendalian Anggaran Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena adanya defisit anggaran. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal untuk menjamin kegiatan kegiatan Prioritas dan Unggulan dapat tetap dilaksanakan meskipun kondisi keuangan masih belum pulih. Hal ini juga membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB dilakukan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Sehingga dalam rangka menunjang keberlangsungan pelaksanaan program/kegiatan yang ada, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berinisiatif melakukan efisiensi program/kegiatan/subkegiatan diatas berdampak positif dalam efisiensi kinerja pelaksanaan penganggaran program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, dimana anggarannya dapat dialihkan untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mendukung tercapainya kinerja.

Sumber anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB secara keseluruhan berasal dari APBD Provinsi NTB. Untuk mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditentukan, anggaran yang dipergunakan sebesar 94,13% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,87%. Sedangkan tingkat efektifitas penggunaan anggaran Sekretariat DPRD sebesar

5.87% yang dihitung dari realisasi anggaran sebesar 94,13 % dibagi tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Tingkat efesiensi dan efektifitas kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan program yang dijalankan dapat dilihat pada tabel 3.7.

Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya termasuk efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah dengan melakukan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan visi misi RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, dengan demikian sasaran strategis dapat sinkron dengan kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD. Berikut tabel efisiensi anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2022.

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD									
	INDIKATOR: Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	100	100	100	128,177,831,741	120,649,100,319	94.13		7,528,731,422
	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	BB	100	70,054,687,190	65,304,657,308	93.22		4,750,029,882
	INDIKATOR: Nilai SAKIP OPD				100					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	22	22	100	565,098,200	492,881,904	87.22		72,216,296
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	1	1	100	203,071,000	182,286,104	89.76		20,784,896
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	1	100	77,806,000	61,446,100	78.97		16,359,900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	1	1	100	105,361,200	100,102,500	95.01		5,258,700
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dok	1	1	100	12,968,900	5,744,000	44.29		7,224,900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dok	1	1	100	23,440,000	17,814,500	76.00		5,625,500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	1	1	100	35,135,100	29,902,700	85.11		5,232,400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	16	16	100	107,316,000	95,586,000	89.07		11,730,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jenis	5	5	100	13,032,504,344	12,264,257,242	94.11		768,247,102
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org	129	129	100	12,364,337,344	11,643,104,382	94.17		721,232,962
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	org	6	6	100	235,002,900	227,764,880	96.92		7,238,020
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	7500	14,048	187	214,449,700	209,907,100	97.88		4,542,600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	100	30,207,400	29,534,300	97.77		673,100
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dok	1	1	100	188,507,000	153,946,580	81.67		34,560,420
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	7	7	100	19,825,000	3,970,000	20.03		15,855,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	5	5	100	1,625,000	1,625,000	100.00		-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATU AN	TAR GET	REALI SASI	CAP AIA N	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVA NSI DENGAN SASARA N KINERJ A	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	2	2	100	6,125,000	2,345,000	38.29		3,780,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jenis	2	2	100	12,075,000	-	-		12,075,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jenis	4	4	100	1,206,368,000	927,927,980	76.92		278,440,020
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	orang	129	129	100	266,952,000	253,786,000	95.07		13,166,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Item	2	2	100	742,150,000	510,522,000	68.79		231,628,000
	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Org	129	129	100	69,266,000	65,619,980	94.74		3,646,020
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Org	100	-	-	25,000,000	-	-		25,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	20	21	105	103,000,000	98,000,000	95.15		5,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	9	100	4,549,289,940	4,255,533,549	93.54		293,756,391
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	4	4	100	131,208,000	123,835,000	94.38		7,373,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	33	36	109	937,023,650	890,109,000	94.99		46,914,650
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis	22	22	100	150,715,740	138,219,625	91.71		12,496,115
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	7	7	100	56,700,000	49,530,000	87.35		7,170,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis	3	3	100	179,380,000	168,664,400	94.03		10,715,600
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Org	2200	6,081	276	2,030,250,000	1,968,527,024	96.96		61,722,976
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	36	42	117	937,202,000	882,994,000	94.22		54,208,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jenis	3	3	100	52,120,550	22,354,500	42.89		29,766,050
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Org	14	15	107	74,690,000	11,300,000	15.13		63,390,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	2	2	100	61,000,000	60,660,000	99.44		340,000
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	-	-	#DIV /0!	0	-	-		-
	Pengadaan Mebel	Jenis	1	1	100	24,000,000	23,750,000	98.96		250,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	1	1	100	37,000,000	36,910,000	99.76		90,000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jenis	0	0	#DIV /0!	0	-	-		-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	3	3	100	5,596,738,760	5,318,867,133	95.04		277,871,627
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat	1000	2,114	211	27,175,000	18,362,500	67.57		8,812,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jenis	4	4	100	902,197,200	821,929,553	91.10		80,267,647
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	132	134	102	4,667,366,560	4,478,575,080	95.96		188,791,480
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	6	6	100	1,898,151,000	1,682,151,341	88.62		215,999,659
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4	4	100	167,600,000	165,431,595	98.71		2,168,405

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATU AN	TAR GET	REALI SASI	CAP AIA N	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVA NSI DENGAN SASARA N KINERJ A	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	66	66	100	696,706,000	634,717,396	91.10		61,988,604
	Pemeliharaan Mebel	jenis	6	6	100	12,500,000	12,075,000	96.60		425,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	17	17	100	234,150,000	178,729,800	76.33		55,420,200
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jenis	1	7	700	787,195,000	691,197,550	87.81		95,997,450
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	-	-	-	-	-	-		-
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	jenis	2	2	100	42,315,913,096	39,541,138,659	93.44		2,774,774,437
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	orang	65	65	100	41,925,913,096	39,269,370,675	93.66		2,656,542,421
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Item	65	65	100	390,000,000	271,767,984	69.68		118,232,016
	Layanan Adminstrasi DPRD	jenis	3	3	100	809,798,850	757,269,500	93.51		52,529,350
	Fasilitasi Fraksi DPRD	kali	180	117	65	198,740,700	173,132,100	87.11		25,608,600
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kali	48	42	88	154,364,800	128,690,000	83.37		25,674,800
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jenis	2	2	100	456,693,350	455,447,400	99.73		1,245,950
	Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD INDIKATOR: Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	58,123,144,551	55,344,443,011	95.22		2,778,701,540
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dok	9	9	100	12,619,972,300	11,991,045,821	95.02		628,926,479
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	raperd a	6	9	150	761,222,800	622,307,800	81.75		138,915,000
	Pembahasan Rancangan Perda	raperd a	12	8	67	313,911,500	136,691,500	43.54		177,220,000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kali	2	3	150	11,222,968,000	10,936,726,521	97.45		286,241,479
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	naskah	6	6	100	301,320,000	295,320,000	98.01		6,000,000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	dokum en	1	1	100	20,550,000	-	-		20,550,000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	doku men	4	4	100	1,088,010,000	735,659,300	67.62		352,350,700
	Pembahasan KUA dan PPAS	kali	14	10	71	409,717,500	234,849,000	57.32		174,868,500
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kali	15	10	67	155,684,500	68,354,000	43.91		87,330,500
	Pembahasan APBD	kali	14	9	64	213,587,000	179,436,300	84.01		34,150,700
	Pembahasan Perubahan APBD	kali	10	17	170	193,960,500	150,660,000	77.68		43,300,500
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kali	10	18	180	115,060,500	102,360,000	88.96		12,700,500
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dok	5	5	100	414,604,900	400,514,600	96.60		14,090,300
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	kali	36	26	72	80,022,500	79,016,700	98.74		1,005,800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	kali	36	34	94	93,930,700	92,979,700	98.99		951,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kali	36	33	92	81,187,500	80,668,500	99.36		519,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATU AN	TAR GET	REALI SASI	CAP AI AN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVA NSI DENGAN SASARA N KINERJ A	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	kali	36	28	78	87,051,700	76,276,900	87.62		10,774,800
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	kali	36	23	64	72,412,500	71,572,800	98.84		839,700
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dok	-	-	-	-	-	-		-
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Org	65	65	100	6,020,183,800	5,071,110,227	84.24		949,073,573
	Bimbingan Teknis DPRD	Org	63	65	103	2,811,615,900	2,778,814,527	98.83		32,801,373
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	kali	36	68	189	2,102,319,800	1,536,329,700	73.08		565,990,100
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Org	200	47	24	493,680,000	198,900,000	40.29		294,780,000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Org	9	9	100	436,101,600	432,000,000	99.06		4,101,600
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Org	480	925	193	132,448,000	98,447,500	74.33		34,000,500
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dok	1	1	100	44,018,500	26,618,500	60.47		17,400,000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dok	4	4	100	28,798,305,551	28,485,174,179	98.91		313,131,372
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	SPPD	975	2,570	264	7,256,912,651	7,128,779,669	98.23		128,132,982
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dok	1	1	100	97,048,000	77,503,000	79.86		19,545,000
	Pelaksanaan Reses	kali	3	3	100	21,444,344,900	21,278,891,510	99.23		165,453,390
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	2	1	50	38,477,200	8,392,500	21.81		30,084,700
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dok	1	1	100	28,848,900	6,304,200	21.85		22,544,700
	Pengawasan Kode Etik DPRD	kali	2	-	-	9,628,300	2,088,300	21.69		7,540,000
	Fasilitasi Tugas DPRD	jenis	4	4	100	9,143,590,800	8,652,546,384	94.63		491,044,416
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	975	612	63	8,405,165,000	8,044,842,884	95.71		360,322,116
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dok	1	1	100	11,530,500	-	-		11,530,500
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	12	22	183	98,787,100	69,105,300	69.95		29,681,800
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	orang	4	4	100	628,108,200	538,598,200	85.75		89,510,000
						128,177,831,741	120,649,100,319	94.13		7,528,731,422
						128,177,831,741	120,649,100,319	94.13		7,528,731,422
						TINGKAT EFISIENSI 5,87 %				
						TINGKAT EFEKTIFITAS 94,13 % ATAU EFEKTIF				

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

3.8 Cross Cutting.

Kolaborasi juga dengan beberapa perangkat daerah/lembaga/stakeholder lainnya pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB, cross cutting tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Tabel Cross Cutting Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD NTB

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propempera)	<i>Sub Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda</i>	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik</i>	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
2	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	<i>Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
3	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	46 OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-1 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-5 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-2 dan 3 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
4	Meningkatnya Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-	Jumlah laporan Pokok-	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok</i>	Bappeda dan OPD	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
	Pokok Pikiran DPRD	Pokok Pikiran DPRD	Pikiran DPRD	Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022

3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pelaksanaan fungsi penunjang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pencapaian **Misi ke-2 RPJMD Provinsi NTB** yaitu “**NTB BERSIH DAN MELAYANI** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi” dengan sasaran pembangunan meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD” dengan indikator kinerja adalah Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Target dan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dituangkan dalam 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 74 (tujuh puluh empat) sub kegiatan. Realisasi keuangan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2022 adalah rata-rata sebesar 94,13%, dan realisasi fisik rata-rata 94,13%. Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 sekaligus juga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Unsur tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki

Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah :

1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
2. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
4. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
5. Struktur Organisasi Kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
6. Komitmen dan Kerjasama yang baik antara staff.
7. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik kedepan.
9. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
10. Dukungan Kebijakan dan Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD.
11. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
12. Pemanfaatan Tenaga Ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

3.10 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp.128.177.831.741,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.120.649.100.319,- (94,13%). Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran

yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap indikator pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TERWUJUDNYA LAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD YANG BERKUALITAS	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI TOTAL ANGGARAN Rp 70,054,687,190.00	MENINGKATNYA NILAI SAKIP OPD		NILAI SAKIP	Rp 70,054,687,190	Rp 65,304,657,308	93.22	93.22	6.78
							BB	BB			
					Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	22 Dokumen	87.22	87.22	12.78
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	5 Jenis	94.11	94,11	5.89
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	7 Dokumen	7 Dokumen	20.03	20,03	79.97
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	76.92	76.92	23.08
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum OPD	9 Jenis	9 Jenis	93.54	93.54	6.46
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	2 Jenis	99.44	99.44	0.56

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
					Daerah						
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	95.04	95.04	4.96
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah	6 Jenis	6 Jenis	88.62	88.62	11.38
					Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Layanan Keuangan DPRD	3 Jenis	3 Jenis	93.44	93.44	6.56
					Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi DPRD	3 Jenis	3 Jenis	93.51	93.51	6.49
2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKATNYA CAKUPAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Rp 70,054,687,190	Rp 65,304,657,308	95.22	95.22	4.78
			TOTAL ANGGARAN Rp58,123,144,551.00				100%	100%			
					Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	9 Dokumen	95.02	95.02	4.98
					Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	67.62	67.62	32.38

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
					Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	96.60	96.60	3.40
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	65 Orang	84.24	84.24	15.76
					Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 Dokumen	5 Dokumen	98.91	98.91	1.09
					Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	1 Dokumen	21.81	21.81	78.19
					Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis	4 Jenis	94.63	100	5.37
	TOTAL ANGGARAN PROGRAM I DAN II						Rp128,177,831,741.00	Rp120,649,100,319.00	94.13	94.13	5.87

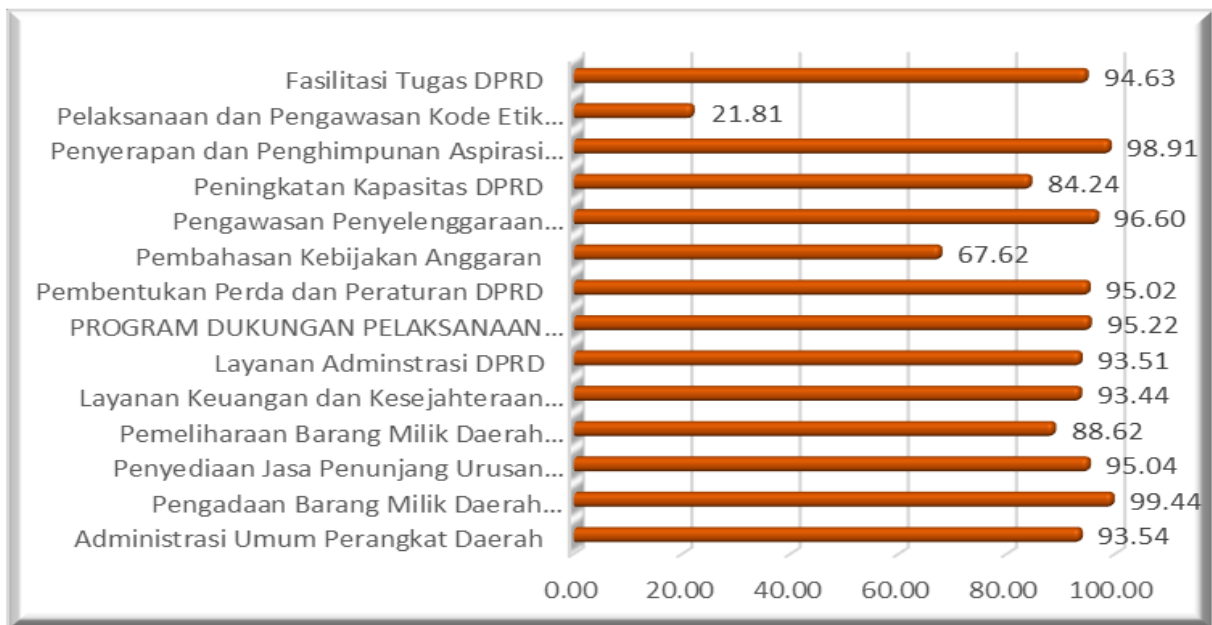
Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
1		2	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	
Anggaran PK Murni 2022	DPA Perubahan 2022	Realisasi Rp.	%
111.726.888.322	128.177.831.741	120.649.100.319	94,13%

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

Selama Tahun Anggaran 2022, belanja yang dilaksanakan Sekretariat DPRD NTB terbagi menjadi 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Realisasi anggaran berdasarkan program yang dilaksanakan dapat dilihat pada gambar 3.3:



Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

- A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Provinsi NTB melaksanakan 2 (dua) Program, 17 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan. Dengan Total Pagu Anggaran Sebesar Rp. 128.177.831.741,- Dari hasil evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD NTB Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 120.649.100.319,- untuk progress fisik mencapai 94,13% dan progress keuangan mencapai 94,13%. Dengan capaian progress fisik 94,13% menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2022 tidak mengalami hambatan berarti, meski demikian progress keuangan 94,13% terdapat sisa anggaran sebesar 5,87% hal ini disebabkan oleh:
- a) Pada tahun 2022 perencanaan dan penganggaran masih diwarnai agenda refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, yang berakibat pada kurangnya realisasi belanja keuangan Sekretariat DPRD NTB yaitu sebesar 94,13% sebagai bagian dari Skema Pengendalian Anggaran Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena adanya defisit anggaran. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal untuk menjamin kegiatan kegiatan Prioritas dan Unggulan dapat tetap dilaksanakan meskipun kondisi keuangan masih belum pulih. Hal ini juga membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB dilakukan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan juga pada pencapaian kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023.
 - b) Terdapat 2 Kegiatan yang dilaksanakan, yang realisasi anggarannya dibawah 40%, faktor penyebab tidak terealisasinya pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 20,03% dari target 100% dan pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang hanya tercapai 21,81% selain karena alasan yang tersebut diatas pada sub a), juga adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2022

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2023	URUSAN
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas		Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang Diinisiasi DPRD	100%	66.67%	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	100%*	100%	
		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	12 Perda	8 Perda	12 Perda	
		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	480 orang	925 orang	480 Orang	
		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	480 kali	207 kali	480 Kali	
		Rapat paripurna yang difasilitasi	jumlah rapat paripurna	46 kali	42 kali	46 Kali	
		Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	3 kali	3 Kali	
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	2860 SPPD	3.182 SPPD	2860	
		Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/pelatihan lainnya	65 orang	65 orang	65 Orang	
		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	36 kali	68 kali	36 Kali	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2022, * Data Sementara

4.2 LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Sekretariat DPRD NTB merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, kebijakan dan program instansi yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bidang administrasi pemerintahan tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD NTB, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan

kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2022 telah memenuhi target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun Rencana Strategis.

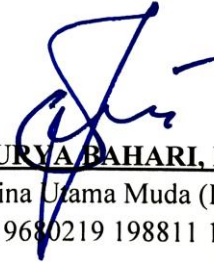
Hasil penilaian unsur pelayanan kepada DPRD menunjukkan bahwa beberapa unsur menunjukkan nilai yang cukup baik, yaitu unsur Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD; Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD; Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD dan unsur Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2022, Ada beberapa unsur pelayanan kepada DPRD yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian Sekretariat DPRD NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya dan perlu ditetapkan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, yaitu :

- i. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.
- ii. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
- iii. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.
- iv. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-undangan.
- v. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan SDM Aparatur.
- vi. Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Februari 2023
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB
SEKRETARIS



Drs. H. SURYA BAHARI, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Eselon II, III, IV, Fungsional dan Staf Sekretariat DPRD NTB
- Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD NTB
- Lampiran 3 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD 2019-2023)
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
- Lampiran 5 : Rencana Aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran 6 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD NTB Tahun 2022
- Lampiran 7 : Capaian Rencana Aksi
- Lampiran 8 : Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan IV Tahun 2022
- Lampiran 9 : SOP Pengumpulan Data Kinerja